



9 770216 168047

JURNAL STIE GANESHA (EKONOMI & BISNIS)

ISSN : 0216 - 1680

VOLUME 3, NOMOR 1, APRIL 2019

Simulasi Penerapan IFRS 16 Leases Pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Persero
Rasmawati A. R, S.E., M.M.

Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Metode Sosiodrama Untuk
Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang *Bullying*
Fatia Aldiana, S.Pd., M.Pd.

Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit
Melati Puspita Hakim, S.E., M.M.

Malas Belajar Faktor SDM Yang Menghambat Berkembangnya Usaha Mikro :
Sebuah Study Kualitatif Manajemen UMKM Dalam Perspektif Claude Levi-Strauss
Dr. Adhy Firdaus, S.E., M.M.
Hj. Devie Iriani, S.E., M.M.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Fahri, S.H., M.M., M.H.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Karyawan
Kepada Konsumen Di PT. ENVILAB Indonesia Gresik
H. A. Firmansyah, S.Kom., M.M.
Toto Wiradisatra, S.T., M.M.

Analisis Faktor *Student Loyalty* Dan *Word Of Mouth* Pada Pendidikan Tinggi
Syarif Hidayatullah, S.Kom, S.E., M.M.

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk
Head Office Divisi Ecommerce Kota Tangerang
Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M.
Erlita Nilan Angelia, S.M.



GANESHA PRESS
2019



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GANESHA - JAKARTA

JURNAL STIE GANESHA
(EKONOMI & BISNIS)
Volume 3, Nomor 1, April 2019

Diterbitkan oleh : STIE GANESHA PRESS

EDITORIAL

Pembina : Dr. Achmad Mulyana, S.E., M.M.

Penanggung Jawab : Dr. Warsono, M.Pd.

Redaksi Pelaksana : Fahri, S.H., M.M., M.H.
H.A. Firmansyah, S.Kom., M.M.
Fuad Gagarin, S.E., M.M.

Editor : Dr. Ir. Sugeng Prayetno, S.E., M.M.

Penyunting : Hendra Permadi, S.T., M.M.

Mitra Bestari : Dr. Ir. Rachman Upe, M.M.
Ekky Noviar, S.E., M.M.

Layout & Desain : M. Tafsiruddin, S.Kom., M.Kom.

Administrasi Umum : Amir Hamzah, SH.I., M.M.

Alamat Redaksi :

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
GANESHA – JAKARTA
Jl. Legoso Raya No. 31 Ciputat Jakarta Selatan
Telepon : (021) 744 3078, Fax. (021) 7471 0842
Email : jurnal@stieganisha.ac.id
(Terbit 2 kali dalam satu tahun : April dan Oktober)

Penerbit :

STIE GANESHA PRESS
Jl. Legoso Raya No. 31 Ciputat Jakarta Selatan
Telepon : (021) 744 3078, Fax. (021) 7471 0842

Pengantar

Sidang Pembaca yang terhormat,

Pada volume ketiga nomor kesatu di bulan April tahun 2019 disajikan 8 artikel. Pokok-pokok persoalan yang dibahas dalam majalah ilmiah edisi ini, mencakup pokok-pokok persoalan ekonomi dan manajemen.

Artikel pertama membahas Simulasi Penerapan IFRS 16 Leases Pada laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Persero. Pada artikel kedua dibahas mengenai Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Metode Sosiodrama Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang *Bullying*. Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit kami ulas di artikel ketiga. Artikel keempat membahas Malas Belajar Faktor SDM Yang Menghambat Berkembangnya Usaha Mikro : Sebuah Study Kualitatif Manajemen UMKM Dalam Perspektif Claude Levi-Stauss. Artikel kelima mengulas Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Karyawan Kepada Konsumen Di PT ENVILAB INDONESIA GRESIK kami ulas diartikel ke enam. Artikel ketujuh membahas Analisis Faktor *Student Loyalty* Dan *Word Of Mouth* Pada Pendidikan Tinggi. Terakhir sebagai penutup artikel kedelapan kami bahas mengenai Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk Head Office Divisi Ecommerce Kota Tangerang.

Sidang Pembaca yang terhormat,

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan pada para penulis yang telah memberikan karyanya. Semoga tulisan-tulisan yang disajikan memberikan manfaat dan kontribusi kepada para pembaca. Selain itu, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini, semoga persaudaraan kita semua tetap terjaga. Amin.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI
JURNAL STIE GANESHA
(EKONOMI & BISNIS)
Volume 3, Nomor 1, April 2019

Pengantar dari Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Simulasi Penerapan IFRS 16 Leases Pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Rasmawati A. R, S.E., M.M.	1 - 21
Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Metode Sosio Drama Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang <i>Bullying</i> Fatia Aldiana, S.Pd., M.Pd.	22 - 34
Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisma Auditor Terhadap Kualitas Audit Melati Puspa Hakim, S.E., M.M.	35 - 62
Malas Belajar Faktor SDM Yang Menghambat Berkembangnya Usaha Mikro : Sebuah Study Kualitatif Manajemen UMKM Dalam Perspektif Claude Levi-Strauss. Dr. Adhy Firdaus, S.E., M.M. Dan Hj. Devie Iriani, S.E., M.M.	63 - 71
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Fahri, S.H., M.H., M.M.	72 - 78
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Karyawan Kepada Konsumen PT. Envilab Indonesia Gresik H. A. Firmansyah, S.Kom., M.M. Dan Toto Wiradisastira, S.T., M.M.	79 - 93
Analisis Faktor <i>Student Loyalty</i> Dan <i>Word Of Mouth</i> Pada Pendidikan Tinggi Syarif Hidayatullah, S.Kom, S.E., M.M.	94 - 110
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk Head Office Divisi Ecommerce Kota Tangerang Dr. Muhammad Ramdhan, M.M. Dan Erlita Nilan Angelia, S.M.	111 - 118
Panduan Untuk Penulis Jurnal	119 - 122

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Fahri, S.H., M.H., M.M.
Dosen STIE Ganesha Jakarta

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia, istilah *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) relatif baru dikenal sejak satu dekade terakhir, bahkan dalam perundang-undangan tentang badan usaha atau perusahaan, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, istilah *Good Corporate Governance* belum dikenal sama sekali, sedangkan dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat, istilah ini sudah lama dikenal.

Sebenarnya istilah *governance* telah cukup lama dikenal, tetapi awalnya bukan dalam kalangan bisnis, tetapi dalam berbagai peraturan kaum gereja seperti dijelaskan A.Davies dalam bukunya berjudul "*Strategic Approach to Corporate Governance*", tahun 1999, bahwa awalnya perkembangan '*governance*' dikenal melalui berbagai peraturan yang diterapkan atau didominasi oleh kaum gereja. Dominasi beralih pada konsep-konsep revolusi serta akhirnya bermuara pada munculnya kapitalisme (*capitalism*) sampai akhir abad lalu. Kapitalisme, yaitu suatu sistem perekonomian berdasarkan hak milik pribadi atas semua jenis harta benda dan kebebasan individu akan mengadakan persetujuan dengan orang-orang lain dan mengikatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi menurut pilihannya demi keuntungannya dan kesejahteraannya sendiri.

Pada abad pertengahan, perdagangan memang sudah dipandang penting, namun pedagang yang mengambil untung dianggap melanggar ajaran agama sehingga bisnis belum dapat berkembang dengan baik. Setelah revolusi industri, melalui upaya memanfaatkan secara praktis penemuan-penemuan baru, bisnis mendapatkan dukungan positif dari masyarakat yang ditandai dengan mekanisasi produksi dan maraknya urbanisasi sehingga kekuatan ekonomi bergeser dari aristokrat dan tuan tanah penguasa lahan ke pelaku bisnis di kota (Gunardi Endro, 1999). Sejak saat itu terbentuk kekuatan kapitalisme yang menguasai perdagangan dan tenaga kerja yang berkembang hingga saat ini, bahkan kaum kapitalisme menguasai perekonomian dunia dan sebagai pelopor terbentuk pasar bebas dan ekonomi global.

A. Konsep Dasar *Corporate Governance*

Pada awalnya hubungan antara buruh atau karyawan dengan pemilik perusahaan adalah subordinasi yaitu antara bawahan dan atasan, sehingga semua aktivitas buruh adalah atas perintah majikan atau pemilik perusahaan, namun perkembangan selanjutnya adanya penghargaan

terhadap buruh lebih baik yaitu buruh dianggap sebagai mitra kerja pemilik atau majikan, sehingga karyawan atau buruh memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi. Pada kondisi yang demikian Pemilik atau pemegang saham di perusahaan secara profesional menyerahkan pengelolaan perusahaan sepenuhnya atau sebagian kepada karyawan atau buruh atau sebagai agen (*Agency*). Oleh karena itu, mulai tumbuh istilah 'kepentingan' dalam perusahaan, yaitu kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan agen sebagai pengelola sebagaimana digambarkan dalam *Agency Theory*.

Pada periode ini pekerjaan *governance* pada unit bisnis ditandai dengan berkembang era *consumerism*. Era *Consumerism* yaitu bahwa konsumen sebagai pangsa pasar atau orang yang akan memanfaatkan hasil kerja produsen atau perusahaan sangat menentukan apakah hasil atau produk dapat diterima atau tidak oleh konsumen. Ini diindikasikan dengan makin meningkatnya persaingan antar korporasi melalui peningkatan kekuatan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* dari sebuah korporasi.

Permasalahan *governance* makin kompleks, karena terdapat berbagai kepentingan yang tumbuh. Awalnya kepentingan pemegang saham dan kepentingan buruh (agen), kemudian ditambah kepentingan konsumen. Perkembangan ini membawa pengaruh signifikan terhadap iklim pengelolaan korporasi yang ditandai dengan munculnya berbagai tantangan baru bagi perkembangan *corporate governance*.

Fenomena perkembangan *corporate governance* dapat dilihat dari upaya untuk mengkomodasikan berbagai kepentingan *stakeholder* yang berhubungan dengan korporasi. Secara konseptual, keberadaan *corporate governance* dapat ditelusuri baik hingga ke akhir abad 18 masehi. Para ahli di bidang *governance* sepakat untuk menyatakan bahwa Adam Smith (1776) merupakan filosof pertama yang dianggap menjadi peletak dasar dalam upaya formalisasi konsep *corporate governance* dalam karya *The Wealth of Nation*.

Perkembangan konsep *corporate governance* hingga abad ke-21, telah melalui dua tahap generasi. Generasi pertama dibidani oleh **Berle dan Means** (1932) dengan penekanan pada konsekuensi dari terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern (*the modern corporation*). Konsep ini menyebutkan sejalan dengan perusahaan semakin besar, maka pengelolaan perusahaan yang semula dipegang oleh pemilik (*owner manager*) harus diserahkan pada kaum *professional*. Dengan demikian adanya pemisahan tegas antara kepemilikan dan pengelola usaha.

Perkembangan *corporate governance* tidak sampai batas mengenai kepentingan yang terkait dengan perusahaan, tetapi ada perkembangan yang signifikan dalam konsep *corporate governance* yaitu yang dikenal dengan generasi pertama. Pada tahap ini ditandai dengan kemunculan seorang pemikir terkenal dalam ilmu manajemen yaitu **Jansen Meckling** (1976). Kedua ekonom ini terkenal dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menandai tonggak perkembangan riset yang luar biasa di bidang *governance*. Melalui teori ini, berbagai bidang ilmu lainnya, seperti sosiologi, manajemen strategik, manajemen keuangan, akuntansi, etika bisnis, dan organisasi mulai menggunakan pendekatan teori keagenan untuk memahami fenomena *corporate governance*. Akibatnya perkembangan *corporate governance* menjadi multi dimensi ilmu.

Pada perkembangan *corporate governance* lebih lanjut menunjukkan semakin meluas dan kompleks, tidak saja masalah konflik masing-masing *stakeholder*, tetapi beralih pada konsentrasi kepemilikan saham yaitu pemilik saham mayoritas dan minoritas yang dilanjutkan dengan bagaimana perlindungan terhadap pemilik saham minoritas tersebut atas dominasi pemilik saham mayoritas ? Perkembangan ini disebut sebagai generasi kedua *corporate governance* yang ditandai dengan hasil karya **La-Porta** dan koleganya (LLSV) pada tahun 1998. Secara signifikan LLSV mengidentifikasi kecenderungan terdapatnya konsentrasi kepemilikan pada pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan Barle dan Means (1932) menurut LLSV (1998, 1999) penerapan *corporate governance* di suatu negara dipengaruhi oleh kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam upaya melindungi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, terutama pemilik minoritas. LLSV menyatakan bahwa di berbagai negara lain di luar AS dan Inggris kepemilikan perusahaan sangat terkonsentrasi. Kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia, dimana konsentrasi kepemilikan saham terutama pada perusahaan-perusahaan besar pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. kadang kala tindakan tersebut sangat merugikan pihak pemilik saham minoritas. Akibatnya konflik kepentingan akan terjadi antara pemilik mayoritas yang kuat dengan pemilik minoritas yang berada pada posisi yang lemah. Titik sentral perdebatan adalah konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan minoritas, namun ada juga berbagai perbuatan yang mengandung konflik kepentingan, yaitu :

- 1) Penilaian yang bias (*exercising biased judgment*)
- 2) Melakukan kompetisi secara langsung.
- 3) Menyalahgunakan jabatan
- 4) Mengambil manfaat dengan membocorkan rahasia usaha.

Lebih lanjut LLSV (1999, 2000) berpendapat bahwa sistem hukum yang tidak kondusif dalam bentuk berpihak pada kepentingan umum, mengakibatkan konflik ini menjadi semakin tajam sehingga berpotensi merusak sistem perekonomian negara secara keseluruhan.

Puncak perkembangan *corporate governance* yaitu pada awal dekade tahun 2000-an dunia dibuat terperangah oleh tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia terkemuka. Dari hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis pakar manajemen dapat disimpulkan penyebab utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG mereka, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip GCG itu antara lain ditandai oleh empat macam hal, yaitu :

- 1) Lemahnya peranan *the Board of Directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; *Boards of Directors* kurang aktif dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan.
- 2) Semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan hutang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

- 3) Tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *Boards of Directors* kepada pemegang saham dan kreditur.
- 4) Dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja di bawah pengawasan langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.

B. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Konsep *corporate governance* sejak lama dikenal di negara-negara maju (Eropa dan Amerika) dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan modal dengan para manajemen dalam perusahaan. Perdebatan muncul pada saat terjadi masalah yang dihadapi oleh beberapa perusahaan publik di United Kingdom Inggris pada akhir tahun 1980-an, yaitu adanya *creative accounting*, kegagalan bisnis yang spektakuler, misalnya runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan WorldCom di AS, serta tragedi jatuhnya *HIH Insurance* dan *One-tel* di Australia pada abad ke-21, serta *Parmalat* di Italia pada awal dekade 2000-an, dan terbatasnya peran *auditor*, dan lain sebagainya. Diskursus mengenai *corporate governance* telah berkembang sampai saat ini sejak krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, terutama di Indonesia.

Istilah *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG kian populer, bahkan istilah ini juga ditempatkan pada posisi terhormat, hal ini terwujud dalam dua keyakinan. **Pertama** GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang berkembang sekaligus menjadi terbuka. **Kedua**, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG, diantaranya sistem hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan ***Board of Directors (BOD)*** yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh **Cadbury Committee** tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai : “A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

Monks dan Minow (1995) mendefinisikan sebagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. **Shleifer dan Vishny** (1997) yang menyebutkan bahwa *corporate governance* sebagai bagian cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan *corporate governance* adalah sebagai berikut : sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan

termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

Australia Stock Exchange (ASE) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut dan juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

World Bank mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menyikapi perkembangan GCG, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan (PERSERO), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “ *GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan*”.

Penerapan Praktek GCG pada BUMN disebutkan bahwa prinsip GCG merupakan kaedah norma maupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Berbagai definisi *Corporate Governance* di atas, pada prinsipnya memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

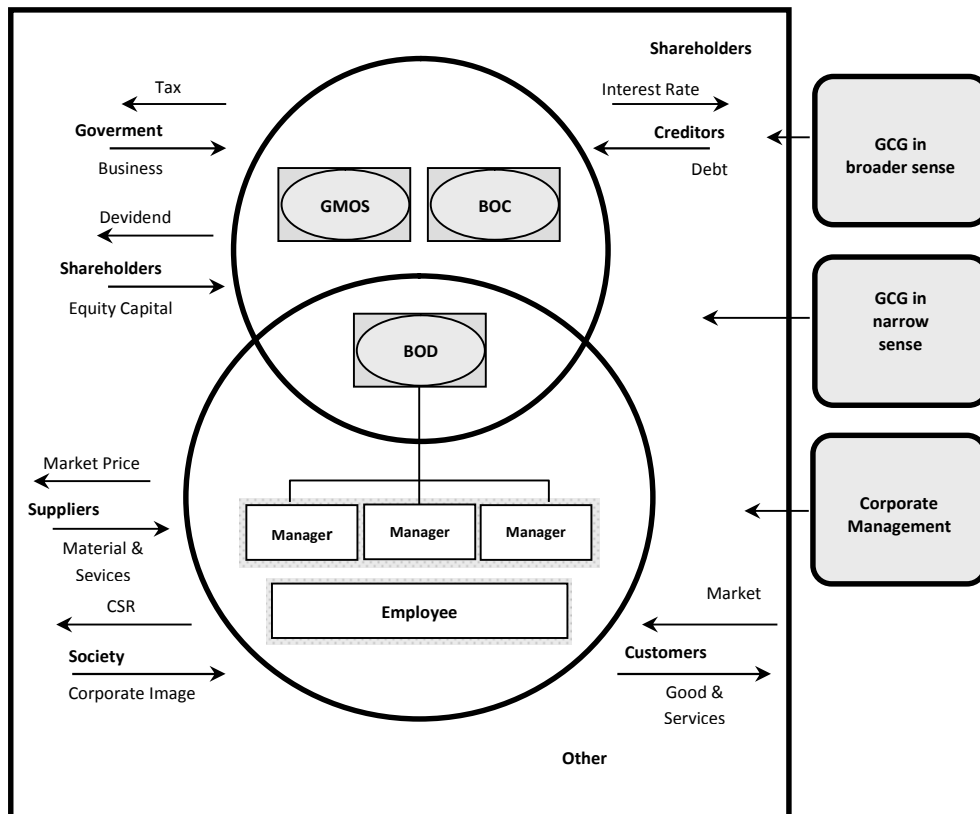
- 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *stakeholder* lainnya.
- 2) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
- 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Kemudian dari pengertian GCG tersebut tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan bisnis, yaitu :

- a. Adanya keseimbangan antara organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.

- b. Adanya pemenuhan tanggungjawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggungjawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Di antaranya, tanggungjawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang lain (*insider information for insider trading*).

Pengertian GCG dalam Arti Luas dan Sempit



Sumber : FCGI dengan modifikasi dari penulis

Gambar diatas adalah ilustrasi definisi atau pengertian GCG. Dengan demikian, pada prinsipnya GCG menata hubungan antara para pihak agar bekerja secara harmonis berdasarkan asas atau prinsip GCG yang disepakati dan mendatangkan keuntungan bersama-sama.

Pada intinya prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu : *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan dalam pengelolaan), *indepency* (kemandirian dalam arti professional), *responsibility* (pertanggungjawaban dalam kesesuaian atau kepatuhan), *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Na'in, "*Applying Good Corporate Governance in Indonesia (a General of State Owned enterprises*", makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi Corporate Governance, diselenggarakan kerja sama Universitas Gadjah Mada dan University of South Caroline, 21 Juli 2005.
- Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance : Sejarah dan Perkembangan, Teori. Model, dan System Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, FE UI, Jakarta, 2005.
- Budiono, *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.
- Darsono, P. *Ekonomi Politik Globalisasi, Kajian : Ekonomi Politik, Filsafat, Antropologi*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Davies, A., *A Strategic Approach to Corporate Governance*, Gower Publishing Ltd, Hampshire, 1999
- Eddi Wibowo, dkk : *Memahami Good Governament Governance dan Good Corporate Governance*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004
- Joni Emieson, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Genta Press, Yogyakarta, 2007